

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE CITY)

Oleh :

Shafira Fajrin Arumsidi¹, Dr. Drs. Aris Tri Haryanto, M.Si², Dr. Herning suryo, M.Si³

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email : shafirafajrinarumsidi@gmail.com

ABSTRAK

Strategi Pemerintah Kota Madiun Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan (Sustainable City)

Kota yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Madiun dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan modernisasi. Konsep ini mengacu pada teori *sustainable urbanism* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Newman & Kenworthy, 1999). Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan tata kota yang terintegrasi dengan prinsip *green city development* (Beatley, 2011), dan *smart growth* (Burton, 2000) untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi pemerintah dalam tata kelola perkotaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah mengambil langkah-langkah strategis yang signifikan dalam mewujudkan kota berkelanjutan, yang selaras dengan konsep *resilient cities* (Davoudi et al., 2012). Hal ini terlihat dari perbaikan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap risiko lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim, serta pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan dan aksesibel bagi semua kalangan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Rekomendasi dari penelitian ini meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi alokasi anggaran untuk program tata kota berkelanjutan, serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengawasan tata kota, seperti penggunaan sistem *smart city* yang mendukung pengelolaan

sumber daya kota secara lebih efisien. Dengan mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam kebijakan strategis jangka panjang, Kota Madiun memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berkelanjutan yang adaptif, inklusif, dan ramah lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Kota Berkelanjutan, Keberlanjutan, Strategi Pemerintah

ABSTRACT

The Strategy Of Madiun City Government In Realizing Sustainable Urban Development (Sustainable City)

Sustainable city has become one of the main priorities of the Madiun City Government in addressing the challenges of urbanization and modernization. This concept refers to the theory of sustainable urbanism, which emphasizes a balance between economic growth, environmental sustainability, and social well-being (Newman & Kenworthy, 1999). This strategy aims to create an environmentally friendly urban environment that is adaptable to climate change while ensuring equal access for all citizens. These efforts are implemented through urban planning policies integrated with the principles of green city development (Beatley, 2011) and smart growth (Burton, 2000) to build an efficient and sustainable city.

This study aims to analyze the strategies of the Madiun City Government in achieving urban sustainability. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and policy document analysis. The study focuses on three key aspects: planning, implementation, and evaluation of government strategies in urban governance.

The findings reveal that the Madiun City Government has implemented significant strategic measures in achieving sustainability, aligning with the concept of resilient cities (Davoudi et al., 2012). This is evident in infrastructure improvements that enhance environmental resilience, the expansion of green open spaces as part of climate mitigation strategies, and the development of environmentally friendly and accessible public facilities. However, the study also identifies several challenges, including budget constraints and suboptimal interagency coordination.

This study recommends strengthening interagency coordination, optimizing budget allocation for sustainable urban planning programs, and increasing public awareness and participation through a participatory approach. Additionally, the Madiun City Government is encouraged to utilize information technology in urban planning and monitoring, such as implementing smart city systems to enhance the efficiency of urban resource management. By integrating sustainability concepts into long-term strategic policies, Madiun City has great potential to become a model of a sustainable, adaptive, inclusive, and environmentally friendly city in Indonesia.

Keywords: Urban Development, Sustainability, Government Strategy

A. PENDAHULUAN

Kota Madiun, seperti banyak kota lain di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. meningkat terus memberi tekanan pada infrastruktur kota, transportasi, perumahan, dan ruang terbuka hijau. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Jawa Timur terus meningkat sebesar 2,7% per tahun, dengan kontribusi yang signifikan dari kota-kota menengah seperti Madiun (BPS, 2022). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan perencanaan ruang ini mengakibatkan masalah seperti kemacetan, berkurangnya kualitas lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap fasilitas publik.

Pengelolaan limbah dan sampah juga menjadi tantangan besar. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampah perkotaan di Indonesia tidak terkelola dengan Madiun. Sampah yang menumpuk di TPA sering kali air, sementara implementasi konsep 3R (Reduce, Reuse, terbatas. Kota Madiun sendiri masih mengandalkan untuk pengelolaan sampah, yang memerlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi. 2 Tantangan lain adalah ketergantungan pada energi fosil, yang konsumsi energi di Indonesia menurut data dari Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021. berdampak pada biaya tinggi dan emisi karbon, tetapi juga menghambat transisi ke energi terbarukan yang lebih efisien

dan berkelanjutan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terkait perilaku berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah rumah tangga atau penggunaan transportasi umum, masih rendah.

Kota Madiun juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan melalui pemanfaatan ruang publik yang lebih optimal. Ruang publik, seperti taman kota dan jalur hijau, tidak hanya dapat menjadi tempat rekreasi tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu mengurangi polusi udara. Namun, keberadaan ruang-ruang ini masih terbatas sistem tata kota yang mendukung keberlanjutan. pemerintah perlu fokus pada pengembangan ruang publik yang inklusif dan berfungsi ganda.

Keberlanjutan kota tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Edukasi yang pengelolaan sampah, penghematan energi, dan gaya hidup ramah lingkungan sangat diperlukan. Dengan melibatkan masyarakat perencanaan dan implementasi, Kota Madiun dapat perkotaan yang berdaya tahan, inovatif, dan berorientasi

B. Landasan Teori

1. Konsep Manajemen Publik

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan

kepada masyarakat.

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

2. Pengertian Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pertama kali didefinisikan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporan Our Common Future pada tahun 1987. WCED mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan sebagai “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (WCED, 1987). Konsep ini menekankan

pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

1. Keberlanjutan lingkungan

Berfokus pada pelestarian ekosistem, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta pengurangan polusi. Dampak negatif seperti pemanasan global, pencemaran, dan degradasi tanah dapat diminimalkan melalui strategi ini (UN-Habitat, 2021). Contohnya meliputi penggunaan energi terbarukan, penanaman kembali hutan, serta pengelolaan limbah berbasis teknologi yang ramah lingkungan.

2. Keberlanjutan ekonomi

menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang efisien, inklusif, dan jangka panjang. Hal ini mencakup pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, penerapan ekonomi sirkular, dan inovasi teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Evans & Jones, 2013). Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya yang digunakan hari ini tetap tersedia untuk generasi mendatang.

3. Keberlanjutan sosial

Menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya melibatkan kelompok elit, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan warga berpenghasilan rendah (WCED, 1987). Contoh penerapan dimensi ini adalah akses setara ke pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik.

3. Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah yang mengatur perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Pasal 1 ayat 3, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur tentang tata ruang yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam perencanaan pembangunan. Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa

penataan ruang harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan untuk mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Undang-undang ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, memastikan keadilan sosial, dan mengintegrasikan keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi Pemerintah Kota Madiun dalam Mewujudkan Kota yang Berkelanjutan (*sustainable city*) secara objektif dan menyeluruh.

Menurut Sugiyono (2018) “Metode kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna individu dan kelompok, yang menggambarkan permasalahan sosial atau kemanusiaan. Data pada penelitian kualitatif adalah informasi yang merupakan transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet, dan dokumen-dokumen yang lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok”.

Menurut Moleong (2002:3), penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati”. Sedangkan data deskriptif menurut Moleong (2002:6) “merupakan data yang berupa kata-kata dan bukan angkaangka”.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RPJMD Kota Madiun 2019–2024 dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang bersifat integratif, berfokus pada sinergi antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi pemerintah terlihat melalui kebijakan yang mengedepankan pendekatan holistik, di mana setiap sektor saling mendukung dalam pelaksanaan program. Menurut Bapak Thariq Megah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

"Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan mencakup dampak pada ketiga dimensi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Misalnya, pembangunan kawasan seperti Pahlawan Street Center dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan."

1. Kolaborasi dengan Stakeholder

Strategi pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, komunitas lokal, dan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan program. Contohnya adalah:

- **Partisipasi Masyarakat:** Kegiatan gotong royong dan program seperti bank sampah melibatkan masyarakat secara langsung, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program pemerintah.

- **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan untuk mendukung proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti pembangunan fasilitas umum yang ramah lingkungan.

2. Keberhasilan dan Tantangan dalam Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan strategis ini telah

memberikan dampak positif, terutama pada integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, tantangan tetap ada, seperti:

- a. **Sinkronisasi Antar Sektor:** Masih terdapat tumpang tindih antara program yang dijalankan oleh berbagai dinas, yang terkadang menyebabkan inefisiensi sumber daya.
- b. **Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:** Beberapa program tidak dapat berjalan maksimal karena alokasi anggaran yang terbatas.
- c. **Kurangnya Pemahaman Masyarakat:** Edukasi yang belum merata menyebabkan beberapa masyarakat kurang memahami pentingnya keberlanjutan.

Studi Kasus: Pahlawan Street Center Salah satu contoh implementasi strategi pemerintah yang berhasil adalah pengembangan kawasan Pahlawan Street Center. Kawasan ini tidak hanya menjadi ikon baru Kota Madiun, tetapi juga mencerminkan integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pahlawan Street Center dirancang untuk menjadi ruang publik multifungsi yang mendukung aktivitas masyarakat, perdagangan lokal, dan pelestarian lingkungan.

Menurut Ibu Nada, seorang UMKM yang mendapat tempat di kawasan tersebut:

"Sebelumnya kami kesulitan menjual di area yang ramai karena tempatnya tidak tertata. Sekarang dengan Pahlawan Street Center, kami punya tempat yang strategis dan lingkungan yang jauh lebih bersih."

Ruang publik ini juga dilengkapi dengan fasilitas ramah lingkungan, seperti taman hijau dan area pedestrian yang nyaman, sehingga mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Strategi pemerintah dalam RPJMD Kota Madiun 2019– 2024 menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan dalam mencapai keberlanjutan. Proyek seperti Pahlawan Street Center menjadi bukti nyata keberhasilan pendekatan integratif pemerintah. Namun, tantangan seperti sinkronisasi antar sektor dan keterbatasan sumber daya harus segera diatasi untuk memastikan tercapainya tujuan keberlanjutan yang lebih maksimal.

Keberhasilan strategi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang terencana dengan baik dapat menciptakan dampak positif yang luas, mulai dari penguatan ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, Kota Madiun dapat menjadi contoh nyata kota berkelanjutan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Kota Madiun berhasil menempati peringkat kedua dalam pemeringkatan UI GreenCityMetric 2024 sebagai kota paling berkelanjutan di Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan, mendukung ekonomi lokal, dan memprioritaskan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program unggulan yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan berbasis keberlanjutan.

2. Faktor Kunci Keberhasilan Kota Madiun

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Kota Madiun dalam pemeringkatan ini meliputi:

- Tata Pamong yang Efektif: Pemerintah Kota Madiun mampu merancang kebijakan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik.
- Pengelolaan Lingkungan yang Inovatif: Program revitalisasi ruang terbuka hijau dan pengelolaan limbah berbasis komunitas, seperti bank sampah, menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.
- Energi dan Mobilitas Berkelanjutan: Kota Madiun telah menginisiasi penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti jalur sepeda yang terintegrasi dengan fasilitas publik.

3. Tantangan yang Masih Dihadapi

Meskipun telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa, Kota Madiun masih menghadapi beberapa tantangan:

Partisipasi Masyarakat: Tidak semua lapisan masyarakat sepenuhnya memahami pentingnya keberlanjutan, sehingga tingkat partisipasi dalam program lingkungan masih perlu ditingkatkan.

- Keterbatasan Anggaran: Program-program keberlanjutan sering kali memerlukan pendanaan besar, yang menjadi kendala dalam mempercepat implementasi program di semua sektor.
- Adaptasi Teknologi: Sebagian pelaku usaha tradisional masih

kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi yang diterapkan dalam program keberlanjutan.

4. Relevansi dengan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

5. Potensi untuk Masa Depan

Keberhasilan Kota Madiun dalam pemeringkatan ini membuka peluang besar untuk pengembangan program berkelanjutan yang lebih inovatif dan inklusif. Kota Madiun dapat menjadi



Pencapaian Kota Madiun dalam UI GreencityMetric 2024 memperlihatkan bagaimana integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan.

- Dimensi Sosial: Program edukasi dan pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesadaran kolektif.
- Dimensi Ekonomi: Inisiatif seperti revitalisasi pasar tradisional dan dukungan untuk UMKM lokal berkontribusi pada penguatan ekonomi berbasis komunitas.
- Dimensi Lingkungan: Penataan ruang terbuka hijau dan program pengelolaan limbah menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan lingkungan adalah prioritas bagi Kota Madiun.

contoh bagi kota-kota lain di Indonesia untuk menerapkan strategi serupa dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Madiun dapat terus mempertahankan posisi sebagai salah satu kota paling berkelanjutan di Indonesia.

E. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi keberlanjutan di Kota Madiun, dengan menyoroti tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui kajian terhadap kebijakan pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Madiun telah berhasil mengembangkan berbagai program yang mendukung keberlanjutan, yang

ditandai dengan pencapaiannya sebagai kota paling berkelanjutan peringkat kedua di Indonesia berdasarkan UI GreenCityMetric 2024.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, meskipun telah mengalami kemajuan yang signifikan, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi untuk memastikan keberlanjutan dapat berjalan secara optimal dan inklusif.

Dimensi sosial, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program keberlanjutan telah mengalami peningkatan. Inisiatif seperti bank sampah, pengelolaan limbah berbasis komunitas, dan revitalisasi ruang terbuka hijau menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Namun, masih ditemukan tantangan berupa

pemahaman sebagian masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan keberlanjutan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh menjadi faktor yang membuat resistensi terhadap kebijakan baru masih cukup tinggi, terutama dalam aspek pengelolaan limbah dan penggunaan transportasi berkelanjutan.

Dimensi ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa Kota Madiun telah berhasil mengembangkan ekonomi berbasis komunitas melalui dukungan terhadap

UMKM dan revitalisasi pasar tradisional. Program seperti pengembangan pasar yang lebih modern dan inklusif memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses teknologi dan permodalan bagi pelaku usaha kecil, yang masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Oleh karena itu, meskipun kebijakan keberlanjutan ekonomi telah memberikan dampak yang positif, perlu ada optimalisasi dalam hal akses dan kesiapan teknologi di tingkat masyarakat.

Dimensi lingkungan, keberhasilan Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengelola limbah secara lebih efektif, dan mengembangkan transportasi ramah lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pencapaiannya di UI GreenCityMetric. Namun, resistensi terhadap perubahan masih ditemukan, terutama pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital dan implementasi teknologi hijau dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dan sosialisasi masih menjadi faktor kunci yang harus diperkuat agar kebijakan lingkungan dapat diadopsi secara lebih luas oleh masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan keberlanjutan di Kota Madiun telah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi lintas sektor. Terdapat beberapa program yang berjalan secara terpisah tanpa sinkronisasi yang optimal antar

dinas, sehingga efektivitas kebijakan belum maksimal di semua aspek. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan mekanisme koordinasi agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menerapkan kebijakan keberlanjutan, yang terbukti dengan peringkatnya dalam UI GreenCityMetric. Namun, keberlanjutan bukan hanya tentang pencapaian saat ini, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Madiun memiliki peluang besar untuk mempertahankan dan meningkatkan statusnya sebagai kota yang berkelanjutan serta menjadi role model bagi kota-kota lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Perkotaan Jawa Timur*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Laporan Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). *Laporan Statistik Energi Indonesia*. Jakarta: ESDM.
- Stoner, J. A. F. (1982). *Management*. Prentice-Hall.
- Jamaluddin. (2022). *Manajemen Sektor Publik: Konsep dan Teori*. UIN Alauddin Makassar.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). *The New Public Service: Serving Rather than Steering*. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559.
- Wibawa, S., & Rosyadi, S. (2007). *Pengantar Manajemen Publik*. Universitas Gadjah Mada.
- Meier, K. J., & O'Toole, L. J. (2014). *Public Management, Context, and Performance: In Quest of a More General Theory*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 237-256.
- Pollitt, C. (2009). *Decentralization: A Central Concept in Contemporary Public Management*. In *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.
- Terry, G. R. (1975). *Principles of Management*. Homewood.
- Koontz, H., & Weihrich, H. (1988). *Essentials of Management*. McGraw-Hill.
- Sukarna. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*.

- Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratama, Y. D. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 42
- Sukarna. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Rosenbloom, D. H. (2005). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill.
- Adisasmita, R. (2010). *Teori Pertumbuhan Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsal, T. (2019). *Sosiologi Sektor Informal, Perkotaan, Tata Ruang Kota*. Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang.
- Howard, E. (1898). *Garden Cities of To-Morrow*. London: S. Sonnenschein & Co., Ltd.
- Hoyt, H. (1939). *The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities*. Washington, D.C.: Federal Housing Administration.
- Hillier, J. (2007). *Stretching Beyond the Horizon: A Multiplanar Theory of Spatial Planning and Governance*. Aldershot: Ashgate.
- Maftuhin. (2016). *Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator*. Universitas Diponegoro.
- Stubbs, S. (2002). *Inclusive Education: Where There Are Few Resources*. Enabling Education Network.
- Alamsyah. (2009). *Inklusifisme dan Eksklusifisme serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Multikultural*.
- Bunnell, T. (2019). *Inclusiveness in Urban Theory and Urban-Centred International Development Policy*. Journal ITB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (1989). *Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supranto, J. (2000). *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Anto Dayan. (1986). *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Internal
- WCED (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- UN-Habitat (2021). *The Role of Sustainable Cities in Achieving*

Global Goals. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

Evans, J., & Jones, R. (2013). *Sustainable Urban Governance: A Global Perspective*. London: Routledge.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Aldea Noor Alina. (2020). *Analisis Fisik dan Lingkungan Kesesuaian Lahan untuk Rekomendasi Arah Tata Ruang Kota Madiun*. Jurnal Elipsoida, Vol. 3 No. 2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019- 2024

Universitas Indonesia, *GreenCityMetric City Rankings 2024*. Depok, UI.